

**PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA DAN TINGKAT UPAH
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2001-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DEWI SAFITRI

NPM:1351010084

Progam Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1438 H / 2017 M

BSTRAK

PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA DAN TINGKAT UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DISEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DIPROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh :

Dewi Safitri

Sektor industri menjadi sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja karena dianggap sebagai leading sektor. Diprovinsi Lampung sektor industri merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua setelah pertanian. Dalam hal penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang lebih kecil dibandingkan sektor industri kecil dan rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa belum optimalnya sektor industri besar dan sedang dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam menyerap tenaga kerja industri besar dan sedang dipengaruhi oleh jumlah unit usaha dan tingkat upah.

Rumusan masalah adalah apakah jumlah unit usaha dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung pada tahun 2001-2015 secara parsial maupun simultan dan dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara parsial maupun secara simultan dan dalam perspektif ekonomi islam di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2001-2015. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, data-data ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh BPS, berupa data survey tahunan industri besar dan sedang yaitu jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja serta data UMP dari BPS. Dimana dalam penelitian ini menggunakan jumlah unit usaha sebagai variabel X_1 , tingkat upah sebagai variabel X_2 dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel Y .

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha dan tingkat upah berpengaruh signifikan dengan nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan H_3 diterima dan H_0 ditolak. Secara parsial jumlah unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan H_1 diterima dan H_0 ditolak, sedangkan tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai sig. sebesar $0,0117 > 0,05$, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dalam perspektif Ekonomi Islam, tenaga kerja merupakan faktor produksi terpenting dalam proses produksi. Berdasarkan prinsip keadilan dalam menentukan upah, Negara wajib menetapkan upah minimum. Upah minimum provinsi haruslah memenuhi kebutuhan, islam telah melarang upah dibawah upah minimum yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja. Jika upah yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan hidup maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan berdampak pada kurangnya permintaan barang yang mengakibatkan berkurangnya julah produksi perusahaan dan berdampak negatif pada permintaan tenaga kerja.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Dampak Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan Terhadap Kelompok Tani
Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Kasus Pada Kelompok Tani Muara Tani Desa
Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran)

Nama Mahasiswa : Widya Sakti
NPM : 1351010200
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si
NIP. 196511 201992 03 2 002

A Zuliansyah, S. Si., M.M
NIP. 198302 222009 12 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 19750424 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN TERHADAP KELOMPOK TANI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Muara Tani Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”, disusun oleh : Widya Sakti NPM: 1351010200, Jurusan: Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 9 November 2017.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Any Eliza, M. Ak.

(.....)

Sekretaris : Suhendar, M.S.Ak.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Nasruddin, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241 98903 1 003

MOTTO

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : *"(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

(Q.S. An-Anfaal : 53)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Safitri. Lahir di TanjungKarang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Iswanto dan Siti Maemunah. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu SDN 2 Kedamaian, Bandar Lampung lulus pada tahun 2007, lalu melanjutkan studi kejenjang sekolah menengah pertama MTS Negeri 02 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan studi kejenjang sekolah menengah atas MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Iswanto dan ibu Siti Maemunah yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kedua adikku Prastio Yusuf Bahari dan Lisa Nur Halizah yang turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungannya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan tahun 2013 yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Unit Usaha Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar Dan Sedang Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.Moh Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.

2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
4. Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. A. Zuliansyah, S.Si.M.M selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lin.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.

9. Sahabat seperjuangan khususnya kelas A, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penelitian.
10. Teman dan Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian selama ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, 2017
Penulis,

Dewi Safitri
NPM. 1351010084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Tenaga Kerja	
1. Pengertian Tenaga Kerja	17
2. Jenis-jenis Tenaga Kerja	18

3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	20
4. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	22
B. Konsep Perusahaan	
1. Pengertian Perusahaan	27
2. Tujuan Perusahaan	28
3. Bentuk – bentuk Perusahaan	31
4. Hubungan Perusahaan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja	33
C. Konsep Upah	
1. Pengertian Upah	34
2. Fungsi Upah	36
3. Tujuan Penetapan Upah Minimum	37
4. Jenis-jenis Upah	38
5. Hubungan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja....	38
6. Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	40
D. Industri	
1. Pengertian Industri	44
2. Jenis – Jenis Industri	45
E. Penelitian Terdahulu	46
F. Kerangka Pemikiran.....	49
G. Hipotesis.....	51

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	56

C. Metode Pengumpulan Data	57
D. Populasi dan Sampel	58
E. Definisi Variabel Penelitian	59
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	60

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung	67
2. Topografi.....	68
3. Sejarah Provinsi Lampung	69
B. Hasil Penelitian	
1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	75
2. Perkembangan Jumlah Unit Usaha	77
3. Perkembangan Tingkat UMP.....	79
C. Analisis Data	
1. Hasil uji asumsi klasik	80
a. Uji Normalitas.....	80
b. Uji Multikolinieritas.....	81
c. Uji Autokorelasi	82
d. Uji Heteroskedastisitas.....	82
2. Analisis Linier Berganda	84
3. Hasil Uji Hipotesis	
a. Uji Signifikan Simultan (UJI F).....	86
b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T).....	87

c. Uji Koefisien Determinasi.....	89
-----------------------------------	----

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015.....	90
a. Pengaruh Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015	90
b. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015	92
c. Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015	96
2. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Keterbatasan Penelitian	107
C. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Pengangguran Diprovinsi Lampung 2011-2015.....	5
Tabel 1.2	: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Di Provinsi Lampung 2011-2015	8
Tabel 1.3	: Jumlah Tenaga Kerja Disektor Industri Besar - Sedang Dan Disektor Industri Kecil dan Rumah Tangga 2011-2015.....	9
Tabel 1.4	: Jumlah Unit Usaha, Tingkat Upah Minimum Provinsi Lampung dan Jumlah Pekerja Disektor Industri Besar Dan Sedang 2011-2015	12
Tabel 3.1	: Daftar Variabel Penelitian.....	60
Tabel 4.1	: Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan	74
Tabel 4.2	: Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Disektor Industri Besar Dan Sedang	76
Tabel 4.3	: Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Besar dan Sedang 2001 – 2015 (Unit).....	77
Tabel 4.4	: Perkembangan Tingkat Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2001 – 2015 (Rp).....	79
Tabel 4.5	: Hasil Uji Normalitas	80
Tabel 4.6	: Hasil Uji Multikolinieritas	81
Tabel 4.7	: Hasil Uji Autokolerasi	82

Tabel 4.8	: Hasil Regresi Linear Berganda	84
Tabel 4.9	: Hasil Uji Simultan (F).....	87
Tabel 4.10	: Hasil Uji Koefisien Determinasi	89
Tabel 4.11	: Tingkat UMP dan KHM Provinsi Lampung 2001 -2015 (Rp).....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Pemikiran	51
Gambar 4.1	: Hasil Uji Heteroskedastisitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 10.A
Tahun 2017 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 : Data Olahan SPSS

Lampiran 5 : Tabel Uji Durbin Watson

Lampiran 6 : Tabel Uji F

Lampiran 7 : Tabel Uji t

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Provinsi Lampung Periode 2001-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹
2. Unit Usaha adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang yang bertanggung jawab atas usaha tersebut yang diukur dengan satuan unit perusahaan.²

¹Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Fajar Mulya. 1996), h. 21

²Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “ *Indikator Industri Besar Dan Sedang Provinsi Lampung 2014* ” (Diakses Pada 10 Desember 2016)

3. Upah adalah pembayaran yang diperoleh pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.³
4. Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.⁴
5. Industri Besar dan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 orang sampai 100 orang atau lebih.⁵
6. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Lampung periode 2001 – 2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul yaitu sebagai berikut :

³Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), h. 351

⁴Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2014), h. 71

⁵Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), h. 232

⁶P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17

1. Secara Objektif

Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif dapat dijadikan modal yang besar bagi pembangunan. Namun, dapat juga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan diakibatkan karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang menyebabkan pengangguran. Untuk itu perlunya perluasan lapangan pekerjaan untuk menampung jumlah angkatan kerja tersebut melalui sektor – sektor unggulan seperti sektor industri. Sektor industri besar dan sedang dalam hal penyerapan tenaga kerja masih kecil dibandingkan sektor industri kecil dan rumah tangga. Hal ini menggambarkan bahwa sektor industri besar dan sedang belum mampu dalam hal penyerapan tenaga kerja, karena itu diperlukan usaha- usaha agar dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Sehingga dalam hal ini membuat penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian tentang pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang Provinsi Lampung.

2. Secara Subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu program studi Ekonomi Islam.

- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di setiap daerah. Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.⁷

Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar berarti merupakan Negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.⁸ Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.⁹ Namun, Jumlah penduduk yang besar tidak selalu diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, jika bagian penduduk yang tidak bekerja dibanding bagian yang bekerja bertambah

⁷Faisal basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan*, (Jakarta:Erlangga, 2002),h. 112

⁸Basir barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Makro*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012),h.15

⁹*Ibid.*,h.8

sampai tingkat tertentu sehingga pertumbuhan tersebut menghambat peningkatan tingkat kehidupan penduduk.¹⁰

Ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja akan menyebabkan terjadinya masalah pengangguran yang dapat membebani anggaran negara.¹¹ Tidak terkecuali diprovinsi lampung, pengangguran menjadi masalah yang sulit terselesaikan, ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran yang mengalami fluktuatif, yang menandai bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum optimal.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Pengangguran
Diprovinsi Lampung 2011 – 2015 (jiwa)

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	ANGKATAN KERJA	PENGANGGU RAN
2011	7.691.007	3.696.065	213.765
2012	7.767.312	3.637.897	188.590
2013	7.932.132	3.681.084	209.482
2014	8.206.191	3.857.936	184.778
2015	8.117.268	3.832.108	196.850

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Dalam Angka

Tabel 1.1, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung disetiap tahunnya meningkat, walaupun pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Lampung menurun sebesar 1,09 persen atau sebesar 88.923 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat, jumlah

¹⁰*Ibid.*,h.9

¹¹Tota Jaunita, *‘Analisa Data Panel Pengaruh Umr, Nilai Output, Jumlah Unit Usaha Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah’*. (Naskah Ilmiah, Univesitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016),h.5

angkatan kerja mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan, jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan tersebut nyatanya tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja, ini dibuktikan dengan peningkatan angka pengangguran sebesar 209.482 jiwa atau sebesar 9,97 persen ditahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa masih belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Sedangkan pengangguran mengalami fluktuatif, pada tahun 2011 turun sebesar 6.854 jiwa, turun kembali pada tahun 2012 sebesar 25.175 jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 20.892 jiwa ditahun 2013, lalu mengalami penurunan kembali sebesar 24.704 jiwa ditahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 12.072.

Menurut Depnakertrans, Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kepasar tenaga kerja. Ketidak seimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya pengangguran. Kemudian meningkatnya angka pengangguran akan menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.¹²

Penyerapan tenaga kerja akan meningkat apabila sektor - sektor ekonomi antara lain pertanian, pertambangan, industri, listrik dan air, konstruksi, perdagangan (hotel dan restoran), komunikasi, keuangan, dan jasa saling menunjang satu dengan yang lainnya. Maka dalam mengatasi masalah – masalah ketenagakerjaan diperlukan adanya sektor-sektor unggulan untuk

¹² Fitria Meiriza Falla, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Industri Kecil dan Menengah Diprovinsi Jawa Tengah*, (Skripsi, Universitas Diponogoro Semarang, 2014)

menyerap tenaga kerja.¹³ Salah satunya adalah sektor industri. Sektor industri dianggap sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang.¹⁴ Menurut Arsyad, sektor industri memiliki peran sebagai sektor pemimpin (*leading sektor*) karena memiliki peran yang sangat penting dalam hal keberhasilan sebuah pembangunan. Dengan adanya pembangunan industri maka diharapkan akan dapat memicu sektor lainnya seperti pertanian dan sektor jasa. Keadaan tersebut mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.¹⁵ Di provinsi Lampung, sektor industri menjadi sektor unggulan setelah sektor pertanian, ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pada PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*).

¹³Yuniarto Fajar Nugroho et. al, ''*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Industri Pengolahan Serta Kontribusinya Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2005 – 2011*'' , (Jurnal Ilmiah, Universitas Jember, 2015)

¹⁴ Thee kian wie, *Industrialisasi Indonesia Analisis Dan Catatan Kritis*, (Jakarta : Pustaka sinar harapan,1988), h.17

¹⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015),h. 442

Tabel 1.2

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Lampung 2011 - 2015 (persen)

No	Lapangan usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	34,67	33,81	33,16	33,70	31,86
2	Pertambangan dan galian	6,03	6,02	6,39	6,31	5,67
3	Indrustri pengolahan	17,14	17,51	17,65	18,03	19,31
4	Pengadaan listrik dan air	0,19	0,17	0,16	0,17	0,18
5	Kontruksi	8,75	8,82	8,73	8,90	8,49
6	Perdagangan, hotel dan restoran	13,39	13,05	12,73	12,46	12,25
7	Transportasi	7,41	7,67	8,03	8,11	8,68
8	Keuangan	4,85	5,04	5,09	5,06	5,07
9	Jasa – jasa	7,56	7,9	8,05	8,25	8,48
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dilihat dari tabel 1.2, sektor indrustri pengolahan memiliki pertumbuhan distribusi positif terhadap PDRB yang meningkat di tiap tahunnya dibandingkan sektor lainnya yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sektor indrustri dalam hal distribusi terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dan selanjutnya terus mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2012, sektor indrustri menyumbang sebesar 17,51 persen atau naik 0,37 persen, tahun 2013 sektor indrustri menyumbang sebesar 17,65 persen, tahun 2014 menyumbang sebesar

18,03 persen dan pada tahun 2015 sektor industri pengolahan telah menyumbang sebesar 19,31 persen.¹⁶

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Banyaknya angkatan kerja yang diserap dalam suatu sektor, menggambarkan kemampuan sektor tersebut dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di provinsi Lampung, sektor industri besar dan sedang dalam hal penyerapan tenaga kerja lebih kecil jika dibandingkan dengan industri kecil dan rumah tangga.

Tabel 1.3

Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Industri Besar – Sedang dan Sektor Industri Kecil – Rumah Tangga

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Dan Rumah Tangga (jiwa)
2011	68.362	290.210
2012	71.989	257.427
2013	62.301	226.872
2014	65.116	292.237
2015	60.040	271.404

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Dilihat dari tabel 1.3, penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang mengalami fluktuatif. Penyerapan tenaga kerja paling besar diserap oleh sektor industri kecil dan rumah tangga, seperti pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja di perusahaan industri besar dan sedang sebesar 60.040 jiwa sedangkan di perusahaan kecil dan rumah tangga, tenaga kerja yang terserap mencapai 271.404 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa industri besar dan

¹⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “ *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2010-2015* ” diakses pada tanggal 01 Desember 2016

sedang belum mampu dalam hal penyerapan tenaga kerja. Untuk itu perlu adanya usaha – usaha yang dilakukan agar dapat mempengaruhi peningkatan permintaan tenaga kerja.

Usaha memperluas kegiatan industri untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor – faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah unit usaha dan tingkat upah. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal industri besar dan sedang pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Menurut Tri Wahyu Rejekiningsih dalam penelitiannya, jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula, Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah.¹⁷ Selain itu tingkat upah juga memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja. Dalam penelitian yassir amri dan abu bakar, mengenai peran usaha industri mikro dan kecil dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi aceh, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan variabel upah. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan positif terhadap permintaan tenaga kerja. Ketika upah meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,069. Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang

¹⁷Tri Wahyu Rejekiningsih, *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Tengah*, Volume 1 No 2, Desember 2004

pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan pada kenaikan jumlah output sebesar 1% akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,184%.¹⁸ Hal tersebut juga diperkuat hasil penelitian Riky Eka Putra dan Anak Agung Yuli Harsinta Dewi dan Marhaeni, yang menyatakan bahwa nilai upah berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan upah memang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui peningkatan output, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Menurut Afrida, Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah karena adanya perubahan permintaan hasil produksi, asumsinya jika upah naik maka akan mempengaruhi harga barang, yang mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya hasil produksi.¹⁹ Sejalan dengan Afrida, penelitian yang dilakukan oleh Rini susilawati, yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja.

¹⁸Yassir Amri, Et.Al, *Peran Usaha Industry Mikro Dan Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Diprovinsi Aceh*, (Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Vol 1,No,1 Febuari 2013),h.84

¹⁹Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003),h.205

Tabel 1.4

Jumlah Unit Usaha, Tingkat Upah Minimum Provinsi Lampung dan Jumlah Pekerja disektor Industri Besar dan Sedang 2011 – 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Unit Usaha /Perusahaan	268	302	301	299	284
Upah Minimum Provinsi (Rp)	855.000	975.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000
Jumlah Pekerja	68.362	71.989	62.301	65.116	60.040

Sumber : BPS, *Indikator Industri Besar Dan Sedang Provinsi Lampung 2010-2014 dan lampung dalam angka 2016*

Dilihat dari tabel 1.4, Terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di provinsi lampung menunjukkan penurunan ditiap tahunnya, penurunan yang terjadi pada tahun 2014 nyatanya mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja sebesar 4.52 persen dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2012. Sedangkan pada tingkat upah minimum provinsi selalu mengalami peningkatan ditiap tahunnya, Kenaikan tersebut tak lepas dari upaya perbaikan ekonomi pekerja. Namun walaupun mengalami kenaikan upah dalam hal permintaan tenaga kerja masih mengalami peningkatan, seperti yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 5.31 persen dan pada tahun 2014 sebesar 4.52 persen , Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Afrida.

Tenaga kerja dianggap penting dalam hal pembangunan, karena tenaga kerja merupakan modal bagi pembangunan. Dalam islam tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi, karena semua kekayaan alam tidak berguna apabila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah

memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an yaitu surat Qs. An-Nahl ayat 97, sebagai berikut :²⁰

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT berjanji benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dalam dunia pada hambanya baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal sholeh yaitu segala amal yang mengikuti petunjuk *al-qur'an* dan *sunnah* sedang hati mereka penuh keimanan.²¹ Sebagai pekerja yang telah menyumbangkan tenaganya ke perusahaan, maka pekerja berhak menerima upah. Berdasarkan prinsip keadilan dalam menentukan upah, Negara wajib menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan keuntungan yang diterima oleh pengusaha sehingga tidak merugikan bagi kedua belah

²⁰Nurul huda et. al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana,2008), h. 227

²¹ Samrotul Puadah, *Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Ekonomi Islam*’, (Skripsi, IAIN Raden Intan 2015)

pihak. Upah disuatu Negara harus memenuhi kebutuhan hidup layak, besaran upah akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akhirnya dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja.²²

Kesempatan kerja diperlukan guna mengurangi pengangguran yang terjadi. Sehingga perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu dan menyeluruh terus ditingkatkan untuk dapat menjamin terciptanya perluasan kesempatan tenaga kerja sebanyak mungkin.²³

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian terutama pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait **Pengaruh Jumlah Unit Usaha Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Indrustri Besar Dan Sedang Di Provinsi Lampung Periode 2001 – 2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang diprovinsi Lampung periode 2001-2015 ?

²² Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Ed 1 Cet 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2016),h.241

²³ Priyono Tjiptoherijanto, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1989),h.67

2. Bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam tentang upah dan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang diprovinsi Lampung periode 2001-2015?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang diprovinsi Lampung periode 2001-2015.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terkait dengan upah dan penyerapan tenaga kerjadi sektor industri besar dan sedang diprovinsi Lampung periode 2001-2015.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan : *Pertama* bagi akademisi, penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja disektor indrustri besar dan sedang. *Kedua* bagi penulis, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan : *Pertama* bagi pemerintah, agar dapat melakukan peningkatan pengelolaan atau usaha-usaha di industri pengolahan khususnya industri besar dan sedang agar dapat menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah pengangguran. *Kedua* bagi masyarakat, agar dapat memperoleh pengetahuan tentang pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia.²⁴

Diantara faktor produksi tersebut, tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi melebihi faktor yang lainnya seperti tanah, modal dan yang lainnya. Proses produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada manusia yang mengendalikannya sekalipun teknologi yang digunakan sudah sangat modern. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 1, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.²⁵

Menurut Mulyadi, Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara

²⁴ N. Greogry Mankiw, *makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga,2006),h.213

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (On-Line), Tersedia Di [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com) Diakses Pada Tanggal 25 april 2017, 10;21 WIB)

yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.²⁶

Menurut murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.²⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

2. Jenis-jenis Tenaga Kerja

Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu :

- a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja(seperti mahasiswa, pelajar,ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja.

Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja.

Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yng

²⁶ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014),h.71

²⁷ Murti Sumarni Dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : 2014),h.5

dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.

28

Pada dasarnya tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Angkatan kerja

Pengertian angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu sebagai berikut : angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.²⁹ Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.³⁰ Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.³¹

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan tentang definisi penduduk bukan angkatan kerja diantaranya yaitu : menurut ostinasia yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya

²⁸ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013),h. 18

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014),h.6

³¹ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2014), h.72

tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.³² Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang berusia 10 tahun keatas yang selama seminggu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.³³

3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu.³⁴ Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa karena permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja turunan (*derived demand*) dimana permintaan akan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya.³⁵

Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian, saat perekonomian dalam kondisi baik maka permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi sedangkan pada saat perekonomian lesu maka permintaan akan tenaga kerja juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi maka

³²Ostinasia Tindaon, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah Pendekatan Demotrik", (jurnal, maret 2015), h.6

³³*Ibid.*, h.4

³⁴ Oktaviana Dwisaputri Dan Tri Wahyu Rejeki Ningsih, " Analisis Penyerapn Tenaga Kerja Dikota Salatiga'', (Jurnal ekonomi 25 Maret 2015),h.5

³⁵ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Social Vol.8 No.3, Oktober 2012),h.196

tingkat pengangguran akan rendah, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka tingkat pengangguran akan tinggi.³⁶

Secara teoritis dalam Negara yang sedang berkembang bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja atau partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula. Dengan demikian, faktor - faktor yang dapat meningkatkan demand tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dari masyarakat dimana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan juga tingkat upah.³⁷

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan.³⁸ Penawaran tenaga kerja sendiri merupakan cerminan dari jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas-karya (upah atau gaji, berupa uang atau berupa barang).³⁹ Sumber daya manusia dalam teori klasik merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Pada perekonomian yang modern, terdapat kendala yang dihadapi berupa gangguan yang terjadi baik disisi permintaan maupun penawaran. Upah dan kesempatan kerja yang selalu

³⁶Fordebi dan Adesy, *Op.Cit*,h.233

³⁷*Ibid.*,

³⁸Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003),h.209

³⁹Ulfa Fuadilah Hasanah, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Menengah Dan Besar Pekalongan 2008-2013*,(Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta,2016),h.8

berubah merupakan respon dari perubahan yang terjadi dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Ketika pasar kerja bereaksi terhadap gangguan yang terjadi, upah dan kesempatan kerja akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan yang baru. Secara umum faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja ialah jumlah penduduk, stuktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah dan kondisi perekonomian.⁴⁰

4. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam

a. Makna Tenaga Kerja

Menurut imam syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia.⁴¹ Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan dikelola oleh buruh.⁴²

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al-Jaatsiyah ayat 12-13 yaitu :

⁴⁰Fordebi, *Op.Cit*,h.237

⁴¹Nurul Huda Et.Al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana,2008),h.227

⁴² Samroatul Puadah, *Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung,2015),h.71

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾﴾

Artinya : “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Makna dalam ayat tersebut adalah bagi manusia telah disediakan kekayaan alam dilangit dan dibumi, maka manusia dianjurkan untuk mengolahnya sebagai rasa syukur dan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Manusia yang bersedia mengelola sumber daya alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan mampu memakmurkan bumi. Tugas pengolahan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kekayaan bumi yang luar biasa ini perlu dieksplorasi agar kekayaan yang tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemudahan kehidupan manusia dan tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia.⁴³

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu allah akan memberikan balasan yang setimpal yang

⁴³ FORDEBI, *Op. Cit.*, h.227

sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nahl (16) ayat 97 :⁴⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *‘Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.’*

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.⁴⁵

Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan manusia tersebut.

b. Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi

⁴⁴ Nurul Huda, *Loc. Cit.*

⁴⁵ FORDEBI, *Op. Cit.*, h.228

kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya namun tenaga kerjanya memiliki *skill* yang tinggi, atau banyak tenaga kerjanya yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.⁴⁶ Terkait dengan pentingnya fungsi manusia dalam proses produksi, khususnya dalam mengelola alam maka Al-Qur'an menerangkan tentang prinsip dasar tenaga kerja yakni firman Allah SWT dalam surat Q.S. An-Najm ayat 39, yaitu :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*

Dalam ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa manusia wajib bekerja keras dan sungguh-sungguh. Manusia yang bekerja sungguh-sungguh akan mendapatkan imbal hasil sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, selain itu ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu haruslah dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya. Apabila manusia sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya maka dia akan mendapatkan hasil dari bekerjanya tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Anfaal ayat 53 yang maksudnya adalah apabila manusia tidak mau bekerja atau berusaha maka Allah SWT tidak akan mengubah nasib orang atau kaum tersebut yaitu sebagai berikut :

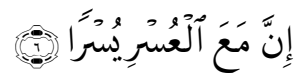
⁴⁶ FORDEBI, *Loc.Cit.*

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Makna lebih dari ayat tersebut adalah seharusnya manusia sebagai individu atau suatu masyarakat bangsa secara agregat bekerja atau berusaha semaksimal mungkin agar terpenuhi segala kebutuhannya. Apabila manusia atau suatu masyarakat malas atau tidak mau bekerja keras, maka manusia atau masyarakat tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan mengalami kemajuan. Manusia atau masyarakat yang malas bekerja atau berusaha akan tertinggal dan tidak akan mampu hidup selayaknya sesuai kebutuhan zamannya. Pada kondisi saat ini, dimana persaingan pada semua aspek kehidupan sangat berat, dibutuhkan semangat dan kemauan berusaha yang tinggi. Manusia atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh akan mendapat hasilnya dan mampu bertahan bahkan mengalami kemajuan sesuai masanya. Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tidak datang dengan tiba-tiba, namun membutuhkan proses usaha yang terus menerus dan tidak mudah putus asa. Kemampuan manusia dalam menghadapi halangan, rintangan, kegagalan dalam bekerja atau proses usahanya perlu diperhatikan karena tidak semua proses berjalan sesuai yang direncanakan,

maka disini diperlukan keuletan dan semangat juang dalam proses meraih kesuksesan usaha atau bekerja. Sesuai dengan firman Allah SWT, terkait hal ini adalah sebagai berikut :



Artinya :” *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”

Ayat ini memberikan motivasi kepada umat muslim, bahwa dalam bekerja dan berusaha apabila mengalami kesulitan dan mau melewatinya dengan terus berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh maka pasti akan tiba kemudahan. Hal ini merupakan janji Allah asal manusia tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan atau halangan tersebut. Keberhasilan atau kesuksesan dalam berusaha tidak datang dengan instan, sering kali harus melewati masa-masa sulit yaitu antara lain adanya kegagalan dalam usaha. Kerja keras dan usaha sungguh-sungguh harus dilakukan dalam bekerja dalam mengelola kekayaan alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada manusia hingga manusia berhasil menguasainya dan mendapat kesejahteraan lahir batin.⁴⁷

B. Konsep Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Menurut Samuel, Perusahaan adalah organisasi khusus yang semata-mata mengelola proses produksi. Produksi dikelola diperusahaan karena efisiensi umumnya membutuhkan produksi berskala besar, pengumpulan sumberdaya keuangan yang sangat besar, dan manajemen serta pemantauan seksama atas

⁴⁷ *Ibid*,h.226

kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁸ Menurut murti perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.⁴⁹ Menurut kanterelis, perusahaan adalah suatu mesin untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat, dimana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok dan penyedia barang publik.⁵⁰ Jadi dapat disimpulkan perusahaan adalah organisasi yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

2. Tujuan Perusahaan

Perusahaan didirikan tentu memiliki tujuan yang telah ditentukan, sebab tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan dan tujuan juga memberikan arah bagi kegiatan dan cara untuk mengukur efektivitas kegiatan perusahaan. Teori ekonomi mikro menyebutkan, setiap perusahaan dalam dunia bisnis adalah bertujuan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh produsen didalam menjalankan kegiatan bisnis mereka, oleh karena itu semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan semakin

⁴⁸ Samuelson Dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi Edisi 17*, Terjemahan Nur Rosyidah et.al, (Jakarta : PT. Media Global Edukasi,2003),h.137

⁴⁹ Murti Sumarni Dan John Suprihanto, *Op.Cit* ,h.5

⁵⁰ Lincoln Arsyad, Stephanus Eri Kusuma, *Ekonomika Indrustika Pendekatan Struktur, Prilaku Dan Kinerja*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014),h. 28

besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan didalam pasar, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh produsen yang bersangkutan.⁵¹

Secara umum tujuan perusahaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :⁵²

- a. Memaksimumkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Apresiasi modal atas investasi harta perusahaan.
- c. Memaksimumkan penjualan.
- d. Memaksimumkan pertumbuhan perusahaan.
- e. Memaksimumkan andil perusahaan.
- f. Stabilitas harga dan output
- g. Kepuasan
- h. Tujuan etika.

Menurut sadono sukirno, pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Adapula perusahaan yang menekankan pada pengabdian masyarakat. Tetapi, disamping menyadari kenyataan tersebut tujuan memaksimumkan keuntungan adalah yang paling penting dalam perusahaan.⁵³ Sementara menurut murti tujuan perusahaan

⁵¹ M. Teguh, *Ekonomi Indrustri*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), h.10

⁵² *Ibid.*, h.12

⁵³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h.192

dibagi menjadi tiga bagian yaitu tujuan pelayanan primer, tujuan pelayanan kolateral, dan tujuan pelayanan sekunder.

- a. *Tujuan pelayanan primer*, Tujuan pelayanan primer dari suatu perusahaan adalah pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tujuan primer ini lebih dipengaruhi oleh konsumen/pasar yang dilayani oleh perusahaan yang bersangkutan.
- b. *Tujuan pelayanan kolateral*, Dalam perusahaan besar, hubungan antara masing-masing pihak menjadi semakin jauh, sedangkan masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Maka perlu diketahui perbedaan antara tujuan primer perusahaan dengan tujuan individu atau yang disebut kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu dalam perusahaan. Sedangkan tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas/umum diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
- c. *Tujuan pelayanan sekunder*, Tujuan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer.⁵⁴

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas tujuan perusahaan adalah untuk menyediakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan mencari keuntungan bagi perusahaan.

⁵⁴ Murti Sumarni Dan John Suprihanto, *Op.Cit* ,h.133

3. Bentuk- bentuk perusahaan

- a. Perusahaan perseorangan, usaha ini dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.⁵⁵ Dalam bentuk perusahaan ini tidak perlu memerlukan izin untuk pendiriannya, karena pemerintah tidak memiliki kategori khusus tentang bentuk usaha ini jadi tidak ada pemisahan antara secara hukum antara perusahaan dengan kepentingan pribadi.⁵⁶
- b. Firma, merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha dimana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbtas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama demikian pula jika mengalami kerugian akan dipikul bersama-sama.
- c. CV (Perseroan Komanditer), Suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberi pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu.
- d. Perseroan terbatas (PT), Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dimana tiap sekutu/persero turut mengambil bagian sebanyak

⁵⁵ *Ibid*,.h.44

⁵⁶ Basu Swasta Dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Ekonomi Perusahaan Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Liberty,1995),h.53

satu atau lebih saham. Pemegang saham hanya dibayarkan deviden jika PT mendapatkan keuntungan.

- e. Perseroan Terbatas Negara (PERSERO), perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan diatur menurut KUHD yaitu seluruh/ sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- f. Perusahaan Negara Umum (PERUM), perusahaan yang terbentuk untuk melayani kepentingan umum, bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital. Pihak swasta diperbolehkan menamamkan modal, meskipun seluruh modal PERUM dimiliki oleh pemerintah.
- g. Perusahaan Jawatan (PERJAN), kegiatan usaha PERJAN ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum. PERJAN dapat memiliki fasilitas-fasilitas Negara, sebab merupakan bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal.
- h. Perusahaan Daerah, perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan Negara.
- i. Koperasi, suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁵⁷

⁵⁷ Murti Sumarni Dan John, *Op.Cit*, h. 45

4. Hubungan Perusahaan dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Sedangkan, perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.⁵⁸

Secara umum, penambahan jumlah perusahaan disektor industri besar dan sedang akan menambah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti akan menambah jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Tri Wahyu Rejekiningsih dalam penelitiannya, jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Bertambahnya jumlah unit usaha atau jumlah perusahaan industri akan menambah jumlah tenaga kerja yang diserap pada industri tersebut. Bertambahnya unit usaha berarti ada tambahan kesempatan kerja, sehingga akan ada permintaan tenaga kerja baru yang meningkat.⁵⁹

Hubungan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriliyanti Ismei, Andri Wijanarko dan Henna Oktaviani dengan judul analisis permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di kabupaten

⁵⁸Rhio Dwi Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Industry Kecil Kabupaten Malang*, (Jurnal, Universitas Brawijaya, 2014)

⁵⁹Tri wahyu rejekiningsih, *Loc.Cit.*

Lamongan. Dalam penelitian tersebut jumlah unit usaha atau perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan semakin meningkat jumlah unit usaha atau perusahaan maka permintaan tenaga kerja juga akan semakin meningkat dan sebaliknya.⁶⁰

C. Konsep Upah

1. Pengertian Upah

Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.⁶¹ Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30), Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan

⁶⁰ Afriliyanti Ismei, *Et.al, Analisis Permintaan Tenaga Kerja Pada Industry Kecil Dan Menengah Dikabupaten Lamongan Tahun 2009-2013 Vol.10. No.1*,(Jurnal Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura,2015),h.109

⁶¹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2013),h.350

⁶²Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Social Vol.8 No.3, Oktober 2012),h.200

dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL).⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Upah Minimum didefinisikan sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.⁶⁵ Karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda maka disebut Upah Minimum Provinsi. Jadi upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan “*living wage*” yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur

⁶³ Abdullah Pius Dan Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkol, 1998), h.602

⁶⁴ Rini Sulistiawati, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Republic Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3

dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pun kinerja contohnya tunjangan jabatan. Berbeda dengan tunjangan makan dan transportasi yang bersifat tidak tetap.⁶⁶

2. Fungsi upah

Adapun Fungsi upah secara umum, terdiri dari yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Untuk mengalokasikan secara efisien sumberdaya manusia Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan yang lebih produktif.
- c. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya.
- d. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan (kompensasi) diharapkan

⁶⁶Fitria Meiriza Falla, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UNDIP, 2014)h.34

dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁷

3. Tujuan Penetapan Upah Minimum

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, pertimbangan-pertimbangan dari penetapan upah minimum di Indonesia adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.
- b. Penetapan standar upah daerah dan sektoral yang realistis harus dilakukan dengan memperhitungkan beberapa aspek — seperti kemampuan perusahaan untuk membayar, kondisi sektor ekonomi di mana usaha ini bergerak dan kondisi ekonomi regional di mana perusahaan itu berlokasi — sangatlah diperlukan untuk menetapkan standar upah sektoral dan regional.

Melihat pada beberapa pertimbangan diatas, amat jelas bahwa maksud dari penetapan upah minimum tidaklah hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pada pekerja, tetapi juga untuk memberikan jaminan perbaikan bagi produktivitas perusahaan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Negara.

⁶⁷ Ayu Wafi Lestari, *Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Kab. Semarang* (Skripsi Fak.Ekonomi, UNDIP, 2011),h.47

⁶⁸ Diah Widiarti, “Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal” (on-line). Tersedia di : http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_123203/lang-en/index.htm (02 agustus 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Karenanya, meningkatkan standar hidup para pekerja tidak menjadi satusatunya tujuan dari kebijakan upah minimum di Indonesia sebab ada aspek-aspek lain yang menjadi dasar pertimbangan, seperti misalnya kondisi angka pengangguran dan kondisi pasar kerja.

4. Jenis- jenis upah

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
- b. Upah Riil yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.⁶⁹

5. Hubungan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan perubahan faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi. Menurut Afrida, Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi, apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut :⁷⁰

⁶⁹Arifatul Chusna, ‘*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2011*’, (Skripsi Unnes, 2013),h. 34

⁷⁰Afrida BR, *Op.Cit*,h.205

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan barang yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale-effect*.
- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh rini sulistiawati yang berjudul ‘‘Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia’’ dalam penelitia tersebut, tingkat upah memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya,

apabila terjadi kenaikan upah maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja.⁷¹

6. Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Konsep Dasar Upah Dalam Islam

Dalam islam, buruh atau karyawan bukan hanya suatu jumlah atau usaha yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.⁷² Sebagai seorang karyawan yang telah menyumbangkan tenaganya bagi kesuksesan tempatnya bekerja selain memiliki kewajiban karyawan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan salah satunya adalah upah.⁷³ Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW, telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulullah juga menuntun untuk berperilaku baik kepada pelayannya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan ketenangan , mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁷⁴

⁷¹Rini Sulistiawati, *Op.Cit*,h, 208

⁷²Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori Dan Paktek*, (Jakarta : Pt Intermasa,1992),h.58

⁷³Samrotul Puadah, *Op.Cit*,h.75

⁷⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012),h.202

Islam juga mengakui bahwa adanya perbedaan upah yang diterima oleh karyawan, ini terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.⁷⁵ Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat maka upah para pekerja harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafur Rasyidin adalah pertengahan, atau menentukan upah pegawai tidak berlebihan tidak juga terlalu sedikit (Proposional). Tujuan utamanya adalah agar para pegawai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.⁷⁶

b. Penetapan Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dalam menentukan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan pengusaha akan

⁷⁵ *Ibid*, h.203

⁷⁶ Lukman Hakim, *Loc.Cit.*

dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka untuk itu Negara perlu menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak terzalimi dan harus sewaktu-waktu dipantau atau ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari. Tingkat Upah Minimum haruslah adil dan layak karena itu upah disuatu Negara harus memenuhi kebutuhan hidup layak. Sementara untuk penetapan tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya.⁷⁷

Islam juga melarang tingkat upah dibawah upah minimum yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, selain itu islam melarang pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarkan sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi , hal ini tercantum dalam surat Q.S. An-najm ayat 39, yaitu :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"*

Dan surat Q.S. Yaasiin ayat 54, yaitu :

⁷⁷Fordebi, *Op.Cit*, h.241

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :”Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”

Jika suatu waktu upah jatuh berada dibawah tingkat upah minimum atau upah berada diatas tingkat upah maksimum, maka Negara berkewajiban dan mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dalam menentukan tingkat upah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha yang pada akhirnya dapat menimbulkan goncangan perekonomian Negara sehingga mengganggu sumber-sumber pendapatan Negara yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai islam. *Pertama*, memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. *Kedua*, memberi kebebasan sepenuhnya kepada para pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya dan sesuai dengan keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografi. Kebebasan dalam mobilisasi kerja di antara daerah dan pekerjaan yang berbeda membantu menjaga kestabilan upah seluruh negeri.⁷⁸

D. Industri

1. Pengertian industri

Dari sudut pandang teori ekonomi mikro, industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen atau

⁷⁸Ibid,h.242

barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat.⁷⁹ Menurut BPS dalam alfa fuadilah, Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakaian akhir.⁸⁰ Pengertian menurut Sandy dalam Riky Eka Putra industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin.⁸¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan indrustri adalah kumpulan perusahaan - perusahaan yang memproduksi atau mengubah barang mentah menjadi barang jadi, barang yang kurang nilainya menjadi barang bernilai yang nantinya barang tersebut memiliki nilai jual.

2. Jenis - jenis Indrustri

Untuk mengetahui jenis - jenis industri ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan industri yang dilakukan oleh dapertemen perindustrian, industri nasional Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

⁷⁹ Muhammad Teguh, *Ekonomi Indrustri*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2013),h.4

⁸⁰ Ulfa Fuadillah Hasanah, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Indrustri Menengah Dan Besar Sekarisedanan Pekalongan*, (Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah, 2016)

⁸¹ Riky Eka Putra, *Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, (jurnal ekonomi pembangunan, universitas semarang, November 2012),h.49

- a. Industri dasar, yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD yaitu industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD yaitu industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat dan sebagainya.
- b. Industri kecil, yang meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam.
- c. Industri hilir, yaitu kelompok aneka industri yang meliputi industri yang mengolah sumber daya pertanian yang mengelolah hasil pertanian, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain.

Kedua, pengelompokan industri menurut Badan Pusat Statistik, skala industri dibedakan menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha yang dipekerjakan, yaitu:⁸²

- a. Industri besar : berkerja antara 100 orang atau lebih.
- b. Industri sedang : bekerja antara 20 sampai 99 orang.
- c. Industri kecil : bekerja antara 5 sampai 19 orang.
- d. Industri rumah tangga atau mikro :bekerja antara 1 sampai 4 orang.

⁸²Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2015),h. 454

E. Penelitian Terdahulu

1. **Riky Eka Putra**, melakukan penelitian dengan variabel penelitian adalah nilai investasi, nilai upah, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan positif antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.⁸³
2. **Afriliyanti ismei, andri wijanarko dan henna oktaviani**, melakukan penelitian dengan variabel jumlah industri, nilai investasi, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Berdasarkan analisis data tersebut disimpulkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel jumlah industri, nilai investasi dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja.⁸⁴
3. **Tota Jaunita**, dalam variabel penelitiannya terdapat jumlah unit usaha dan UMR sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel UMR memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan.⁸⁵

⁸³Riky Eka Putra, *Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, (jurnal ekonomi pembangunan, universitas semarang, November 2012),h.54

⁸⁴Afriliyanti ismei, Et.al, *Loc. Cit*

⁸⁵Tota Jaunita, *Analisis Data Panel Pengaruh UMR, Nilai Output, Jumlah Unit Usaha Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industry Besar Dan Sedang Di*

4. **Rio Dhuwi Saputra**, dengan variabel penelitian jumlah unit usaha, nilai investasi dan upah minimum sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara jumlah usaha, nilai investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara parsial, variabel jumlah unit usaha dan nilai investasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dan variabel upah minimum berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.⁸⁶
5. **Anak agung yuli harsinta dewi dan marhaeni**, dengan variabel penelitian modal, tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja dan output. Hasil penelitian tersebut menunjukkan modal, tingkat upah dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.⁸⁷
6. **Abdul Karib**, variabel penelitian adalah produksi, investasi dan jumlah unit usaha sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial

Jawa Tengah Tahun 2011-2013, (Naskah Publikasi Fak. Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta), h.9

⁸⁶Rio Dhuwi Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Dikabupaten Malang*, (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2014)

⁸⁷Anak Agung Yuli HD dan Marhaeni, *Pengaruh Modal, Tingkat Upah dan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Output Pada Industri Tekstil Dikabupaten Badung*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5 No.10, Oktober 2016), h.1144

maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara produksi, investasi dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri.⁸⁸

7. **Rini sulistiawati**, variabel penelitiannya adalah upah minimum sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat. hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.⁸⁹

8. **Yassir amri, abu bakar hamzah dan sofyan syahnur**, variabel penelitiannya adalah output dan upah sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan dan secara parsial berpengaruh signifikan positif.⁹⁰

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada judul penelitian yang hanya menggunakan dua variabel bebas sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel ataupun satu variabel dan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel output atau nilai produksi sebagai variabel bebas. Selain itu, penelitian ini menggunakan industri besar dan sedang sebagai objek penelitian, sementara penelitian terdahulu menggunakan industri kecil menengah. Selain itu terdapat perbedaan

⁸⁸Abdul Karib, *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat*, (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan Vol.3 No.3, September 2012), h.70

⁸⁹Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia*, (Jurnal EP, Vol.8 No.3, Oktober 2012), h.208

⁹⁰Yassir Amri, Et.Al, *Peran Usaha Industry Mikro Dan Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh*, (Jurnal Ekonomi, Vol.1 No.1 Februari 2013), h.84

dari lokasi penelitian, waktu penelitian penggabungan hasil penelitian serta dalam penelitian ini menggunakan atau menjelaskan bagaimana tenaga kerja dan upah dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pembangunan, namun jumlah penduduk yang besar apabila tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia akan mengakibatkan permasalahan ketenagakerjaan. Untuk itu diperlukannya usaha-usaha yang dilakukan agar dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja melalui sektor unggulan, seperti sektor industri. Dalam hal penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang masih kecil dibandingkan industri kecil dan rumah tangga. Usaha memperluas kegiatan industri tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah unit usaha dan tingkat upah.

Tri Wahyu Rejekiingsih berpendapat bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.⁹¹ Sedangkan pada upah memiliki hubungan terbalik, apabila tingkat upah naik maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Karena tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya akan berdampak pada

⁹¹ Tri Wahyu Rejekiingsih, *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Tengah*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No.2, 2004)

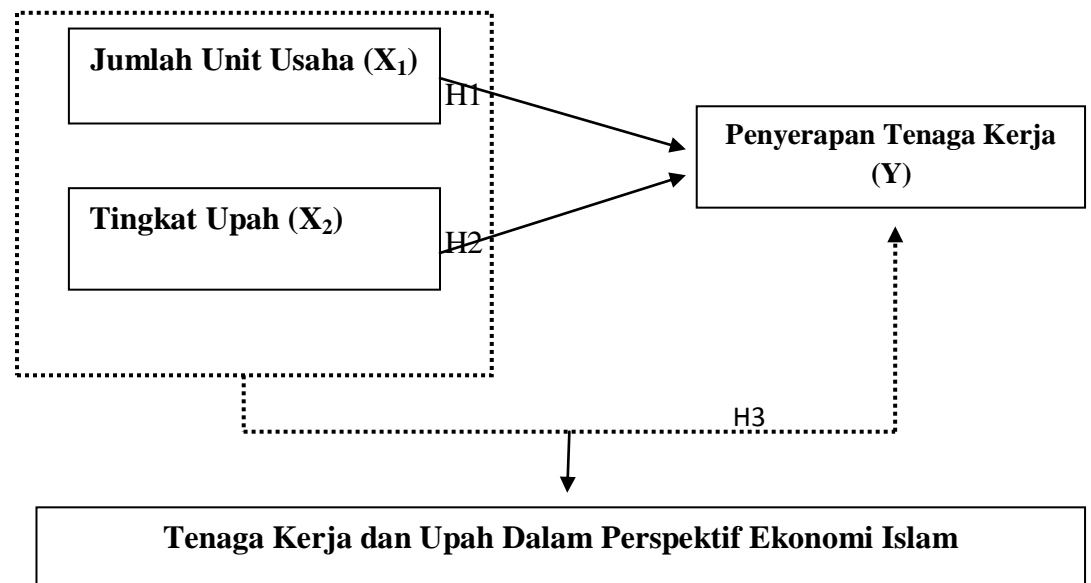
kenaikan barang yang akan menimbulkan pengurangan konsumsi masyarakat sehingga produsen mengurangi jumlah produksi. Turunnya target produksi akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.⁹²

Dalam islam tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi, karena semua kekayaan alam tidak berguna apabila tidak dieksploitasi oleh manusia, dengan menyerapnya tenaga kerja lebih banyak diharapkan akan mengurangi masalah ketenagakerjaan sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pembangunan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan antara variabel diatas, maka ditetapkan bahwa penyerapan tenaga kerja sebagai variabel Y dan jumlah unit usaha sebagai variabel X_1 dan tingkat upah sebagai variabel X_2 , dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2.1:

⁹² Arfida BR, *Op.Cit*, h.205

GAMBAR 2.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁹³ Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

Besarnya jumlah tenaga kerja dalam suatu sektor, menggambarkan optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu sektor tersebut. Semakin besar tenaga kerja yang diminta perusahaan akan mengurangi jumlah pengangguran. Dalam meningkatkan permintaan tenaga kerja perlu adanya analisis yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja, diantaranya jumlah unit usaha dan tingkat upah. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu

⁹³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h.99

dan teori yang sudah dijelaskan, maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Secara umum pertumbuhan unit usaha dalam suatu industri besar dan sedang dalam suatu daerah akan menambahkan jumlah lapangan pekerjaan, penambahan jumlah lapangan pekerjaan tersebut akan menambahkan permintaan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja yang tertampung akan bertambah.⁹⁴

Hal ini serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Afriliyanti ismei, Andri Wijanarko dan Henna Oktaviani, Rio Dhuwi Saputra dan Abdul Karib bahwa variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. H_0 : jumlah unit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001– 2015.
- b. H_1 : jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001– 2015.

⁹⁴Tri wahyu rejekiningsih, *Loc. Cit.*

2. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Afrida, Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi. Diasumsikan apabila upah naik maka akan mempengaruhi harga barang, yang mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang tersebut. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya hasil produksi.⁹⁵

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Afrida, dalam penelitian yang dilakukan Rini Sulistiawati dan Rhio Dhuwi Saputra hasil penelitian tersebut adalah upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Tota Joanita UMR memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. H_0 : tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001– 2015.
- b. H_2 : tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001– 2015.

⁹⁵ Afrida BR, *Loc.Cit.*

3. Pengaruh Jumlah Unit Usaha Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sementara faktor internal meliputi tingkat upah, modal, jumlah usaha dan jumlah produksi. Keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.⁹⁶ Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Dhuwi Saputra, hasil penelitian tersebut adalah Jumlah unit usaha dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh antara jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ho : jumlah unit usaha dan tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001– 2015.
- b. H3 : jumlah unit usaha dan tingkat upah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang tahun 2001 – 2015.

⁹⁶Meiditya Yudi Prabaningtyas, *Pengaruh Upah, Modal, Jumlah Unit Usaha, Jumlah Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Tahu Bakso Dengan Menggunakan Path Analysis*, (Skripsi, Unnes, 2015),h.23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹⁷

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat di seluruh bahan cetakan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga kerja yang terjadi disektor industri besar dan sedang.⁹⁸ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data survey tahunan industri pengolahan besar dan sedang yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik provinsi Lampung.

⁹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), H.13

⁹⁸ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.45

2. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif (Hubungan) , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁹⁹

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.¹⁰⁰ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung baik secara simultan maupun parsial ditinjau dalam persepektif Ekonomi Islam.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

⁹⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015), h.16

¹⁰⁰ Sugiyono, *Op.Cit*,h.5

telah ada.¹⁰¹ Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, laporan tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan tahunan dan dokumen lainnya.¹⁰² Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data upah minimum provinsi dan data survey tahunan industri besar dan sedang yang dilakukan oleh pihak BPS.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁰³. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan tahunan survey industri besar - sedang dan upah minimum provinsi pertahun selama Provinsi Lampung berdiri yang telah di publikasikan oleh BPS Provinsi Lampung, yang diambil menjadi sampel yaitu 15 tahun terakhir dari tahun 2001 – 2015.

¹⁰¹ Iqbal Hasan, *Op.cit*, h. 82

¹⁰² *Ibid*, h.87

¹⁰³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 119

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁰⁴ Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel. Oleh karena adanya keterbatasan data yang dimiliki ataupun diterbitkan oleh BPS, maka peneliti memilih sampel lima belas tahun terakhir yaitu data jumlah unit usaha atau perusahaan, upah minimum provinsi dan jumlah Tenaga Kerja disektor industri besar dan sedang pada tahun 2001-2015 yang telah tersusun dan diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung .

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian¹⁰⁵. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel lima belas tahun terakhir yaitu tahun 2001-2015.

E. Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Terikat (variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung. Data penyerapan tenaga kerja yang akan

¹⁰⁴*Ibid*, h.126

¹⁰⁵*Ibid*, h. 120

diteliti adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak BPS Provinsi Lampung yang diambil dari tahun 2001-2015.

2. Variabel Bebas (Variabel independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah data jumlah unit usaha dan tingkat upah yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung dari tahun 2001-2015. Yang dimaksud jumlah unit usaha adalah banyaknya perusahaan industri besar dan sedang provinsi Lampung jumlah perusahaan yang diukur dalam satuan unit. Sedangkan, tingkat upah dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Tabel 3.1
Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Ukuran	Referensi	Skala Pengukuran Variabel
Jumlah Unit Usaha (X_1)	Jumlah Perusahaan industri besar - sedang	BPS	Rasio (Unit)
Tingkat Upah (X_2)	Upah Minimum Provinsi	BPS	Rasio (Rp)
Tenaga Kerja (Y)	Jumlah Tenaga Kerja	BPS	Rasio (Orang)

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁰⁶

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikandata observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Alat Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi

¹⁰⁶Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*(Yogyakarta: ANDI,2002),h.42.

klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan lulus uji asumsi.

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrovmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.¹⁰⁷

2) Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolineritas

¹⁰⁷ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-56

(multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefisien korelasi antar variabel *independent* haruslah lemah dibawah 0,05 Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolineritas¹⁰⁸. Untuk mendeteksi multikolineritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus sebagai berikut:¹⁰⁹

VIF	Tolerance
-----	-----------

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad \text{dan} \quad (\hat{\beta}_i) = 1/VIF$$

Keterangan:

VIF : Variance Inflation Factor

R^2 : R-Square

di mana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

¹⁰⁸ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h.207.

¹⁰⁹ Agung Abdul Rasul, *Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 134

autokorelasi dalam suatu penelitian, menggunakan nilai durbin waston dengan criteria jika :

- a) Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif.
- b) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.¹¹⁰
- 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.¹¹¹

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. analisis regresi berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independent terhadap variabel dependent. persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :¹¹²

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

B₀ = Bilangan Konstanta

¹¹⁰Wiratna Sujawerni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress,2015),h.177

¹¹¹Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito,2009), h.373

¹¹²Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, *Ekonometri*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014),h.6

b_1X_1 =Jumlah Unit Usaha

b_2X_2 = Tingkat Upah

c. Alat Analisis

1. Uji Hipotesis F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Nilai f hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-n-1)}$$

Keterangan :

R = Korelasi

K = variable independent

N = Jumlah sampel

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan uji berikut:¹¹³

- 1) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
- 2) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :¹¹⁴

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)

¹¹³Sudjana, *Metode Statistic*, (Bandung : PT.Tarsito,2009),h.373

¹¹⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta : Bumi Aksara,2012),h.89

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

2. Uji Hipotesis t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja yang merupakan variabel dependennya. Adapun persamaan rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$t_{hit} = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel

r = koefisien korelasi

Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program spss sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima
- 2) Jika probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak

¹¹⁵ Sudjana, *Loc.Cit.*

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :¹¹⁶

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)
3. Koefisien Determinasi

Pada regresi linear berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.¹¹⁷

¹¹⁶ Iqbal Hasan, *Loc.Cit.*

¹¹⁷ Sudjana, *Loc.Cit.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Provinsi Lampung

Daerah provinsi Lampung meliputi areal dataran 35.288,35 KM² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, disebalah utara
- b. Selat Sunda, di sebelah selatan
- c. Laut Jawa, disebalah Timur
- d. Samudera Indonesia, disebalah barat

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar ikan, Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan di laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Indonesia dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Raden Intan II, 28 km dari ibukota melalui jalan

negara menuju Kotabumi dan lapangan terbang AURI terdapat di Manggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara geografis provinsi Lampung terletak pada kedudukan :

Timur – Barat berada antara : $103^{\circ}40'$ – $105^{\circ}50'$ Bujur Timur

Utara – Selatan berada antara : $6^{\circ}45'$ – $3^{\circ}45'$ Lintang selatan

2. Topografi

Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi yaitu sebagai berikut :

a. Topografis berbukit sampai bergunung

Lereng-lereng yng curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300M di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran dan Gunung Rajabasa. Puncak lainnya adalah bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat dibagian utara.

b. Daerah topografis berombak samapai bergelombang

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapat bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8 % samapai 15 % dan ketinggiannya antara 300 M sampai 500 M dari permukaan laut. Daerah tersebut meliputi daerah Kedaton kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kab. Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kab. Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kab. Lampung Tengah.

c. Daerah Dataran Alluvial

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur, yang merupakan bagian hilir dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 M sampai 75 M dengan kemiringan 0% - 3%.

d. Daerah dataran Rawa Pasang Surut

Disepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian $\frac{1}{2}$ M sampai 1 M, pengendapan air menurut naiknya pasang air laut.

e. Daerah River Basin

Terdapat lima River Basin yang utama di daerah Lampung yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, River Basin Way Mesuji.

3. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3/1964 yang kemudian menjadi undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu provinsi Lampung merupakan karesidenan yang tergabung dengan provinsi Sumatera Selatan.

Kendatipun provinsi lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di nusantara yang

tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Tatkala Banten dibawah pimpinan sultan agung tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC diperairan Jawa, Sumatera dan Maluku.Sultan agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia.Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji disertai tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.

Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karena itu VOC selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten.Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 april 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan didaerah Lampung.

Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vender Schuur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspidisi Vander Schuur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.

Sementara itu timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada dibawah kekuasaan Sultan Banten, kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut “jenang” atau kadang-kadang disebut Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada). Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpecah-pecah pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut “Adipati” secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan jepang/gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja, dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda

karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung. Sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin kuat dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusmen yang menghasilkan persetujuan bahwa :

- a. Raden Intan memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f.1.200 setahun.
- b. Kedua saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f.600 tiap tahun.
- c. Raden Intan tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten dan ia tetap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Raden Inten, namun dengan cerdik Raden Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Leliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825-1830), maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Raden Intan meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imba Kusuma. Setelah perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu Raden Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada

tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai. Raden Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Raden Imba Kusuma kemudian di buang ke pulau Timor. Pada saat itu rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan, “jalan halus” dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin namun perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan – kepentingan Belanda di daerah Telukbetung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakan oleh putra Raden Intan Imba Kusuma sendiri yang bernama Raden Intan II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Raden Intan II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus di datangkan dari Batavia.

Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman karet, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964

Kresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

Secara administrative provinsi Lampung dibagi dalam 14 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Sejak berdirinya provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini telah dijabat oleh 9 Gubernur/ kepala Daerah Tingkat I berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan

No	Nama Gubernur Tingkat I	Periode
1	Koesno Danu Upoyo	1964 - 1966
2	Hi. Zaina Abidin PA	1966 - 1972
3	R. Soetiyoso	1972 - 1978
4	Yasir Hadibroto	1978 - 1988
5	Poedjono Pranyoto	1988 -1998
6	Drs. Oemarsono	1998 - 2002
7	Hari Sabarno	2002 - 2004
8	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH	2004 - 2008
9	Drs. Syamsura Ryacudu	2008 – 2009
10	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH	2009 - 2014
11	M. Ridho Ficardo, Spi, Msi	2014 - sekarang

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja yang terjadi disektor Indrustri besar dan sedang Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data *time series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2001 – 2015. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat *software* computer SPSS 21 dengan metode analisi regresi linear berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha dan tingkat upah yang terjadi di sektor industri besar dan sedang Provinsi Lampung.

1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Perkembangan penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung dari tahun 2001 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Disektor Industri Besar
Dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015 (Orang)

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang	Perkembangan (%)
2001	58.937	21,92
2002	58.602	-0,57
2003	47.672	-18,65
2004	62.890	31,92
2005	57.659	-8,32
2006	83.359	44,57
2007	72.531	-12,99
2008	79.632	9,79
2009	65.594	-17,63
2010	60.128	-8,33
2011	68.362	13,69
2012	71.989	5,31
2013	62.301	-13,46
2014	65.116	4,52
2015	60.040	-7,80

Sumber : BPS, *Indikator Industri Besar Dan Sedang Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dijelaskan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung, dari tahun 2001 – 2015 mengalami fluktuatif, jumlah tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 44,57 persen atau 83.359 orang dan jumlah tenaga kerja terkecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 47.672 orang. Dari tahun 2001 – 2003, penyerapan tenaga kerja perusahaan besar dan sedang mengalami penurunan , dan mengalami peningkatn kembali sebesar 31,92 persen pada tahun 2004, sedangkan, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 8,32 persen. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006-2008 terjadi fluktuasi, Jika dibandingkan dengan tahun 2007 jumlah pekerja yang terserap oleh perusahaan industri besar dan sedang tahun 2008 mengalami peningkatan 9,79 persen. Dan

selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2009 – 2010, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011 hingga 2012, mengalami penurunan sebesar 13,46 persen di 2013 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan.

2. Perkembangan Jumlah Unit Usaha

Unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Sedangkan, perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unit usaha adalah jumlah perusahaan disektor industri besar dan sedang. Perkembangan jumlah unit usaha yang terjadi dari tahun 2001 – 2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Besar dan Sedang
2001 – 2015 (Unit)

Tahun	Jumlah unit usaha atau perusahaan
2001	223
2002	213
2003	194
2004	187
2005	177
2006	400
2007	314
2008	279
2009	267
2010	242

2011	268
2012	302
2013	301
2014	299
2015	284

Sumber : BPS, *Indikator Industry Besar Dan Sedang Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan disektor industri besar dan sedang selalu mengalami fluktuatif. Terlihat bahwa pada tahun 2001 hingga 2005, jumlah perusahaan terus mengalami penurunan dari 223 perusahaan pada tahun 2001 menjadi 177 perusahaan pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2006, terjadi penambahan perusahaan yang cukup tajam yaitu sejumlah 223 perusahaan dan selanjutnya mengalami penurunan di tiap tahunnya. Dari 400 perusahaan pada tahun 2006 menjadi 314 di tahun 2007, pada tahun 2008 menjadi 279 perusahaan, pada tahun 2009 menjadi 267 perusahaan dan tahun 2010 menjadi 242 perusahaan. Dan selanjutnya mengalami peningkatan dari tahun 2010- 2012, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 hingga 2015.

3. Perkembangan Tingkat Upah

Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan tenaga kerja kepada pengusaha. Karena adanya perbedaan tingkat upah dan perbedaan pemenuhan kebutuhan hidup dalam setiap provinsi maka ditetapkan upah minimum provinsi. Upah minimum tersebut dijadikan sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya. Upah minimum tersebut terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap. Perkembangan tingkat upah minimum provinsi Lampung yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan Tingkat Upah Minimum Provinsi Lampung
Tahun 2001 – 2015 (Rp)

Tahun	UMR	Perkembangan (%)
2001	240.000	25
2002	310.000	29,17
2003	350.000	12,90
2004	377.500	7,85
2005	405.000	7,28
2006	505.000	24,70
2007	555.000	9,90
2008	617.000	11,17
2009	619.000	0,32
2010	767.500	23,99
2011	855.000	11,40
2012	975.000	14,03
2013	1.150.000	17,95
2014	1.399.037	21,65
2015	1.581.000	13,01

Sumber : BPS, *Lampung Dalam Angka*

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi Lampung mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya upaya perbaikan ekonomi pekerja dan kesejahteraan pekerja. Meskipun peningkatan setiap tahunnya tidak terlalu banyak tetapi Upah Minimum Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan upah minimum terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 29,17 persen, Namun kenaikan UMP belum dapat diartikan sebagai kenaikan kesejahteraan bagi para pekerja karena belum diimbangi dengan kenaikan penghasilan untuk memenuhi KHL.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka data berdistribusi dengan normal, jika $\text{sig.} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogrof-smirnov* dalam program SPSS 21. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5168.02347692
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		.495
Asymp. Sig. (2-tailed)		.967

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah SPSS 21

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5 diatas dengan menggunakan metode *one sampel komogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah

sampel (N) sebesar 15 adalah 0,967. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,967 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolinieritas terjadi apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Jika hasil uji mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka data tersebut lolos uji multikolinieritas. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	33299.085	6746.177		4.936	.000		
JUU	139.954	28.042	.912	4.991	.000	.805	1.243
UMP	-.007	.004	-.309	-1.691	.117	.805	1.243

a. Dependent Variable: TenagaKerja

Sumber : data diolah SPSS 21

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas bahwa variabel independen yang memiliki

nilai tolerance lebih dari 0,1 dan variabel independen VIF yang kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya $(t-1)$. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian maka dapat dilihat dengan membandingkan nilai durbin Watson hasil regresi dengan durbin Watson tabel. Apabila nilai $du < dw < 4-du$ maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.823 ^a	.678	.624	5582.103	2.003

a. Predictors: (Constant), UMP, JUU

b. Dependent Variable: TenagaKerja

Sumber : data diolah SPSS 21

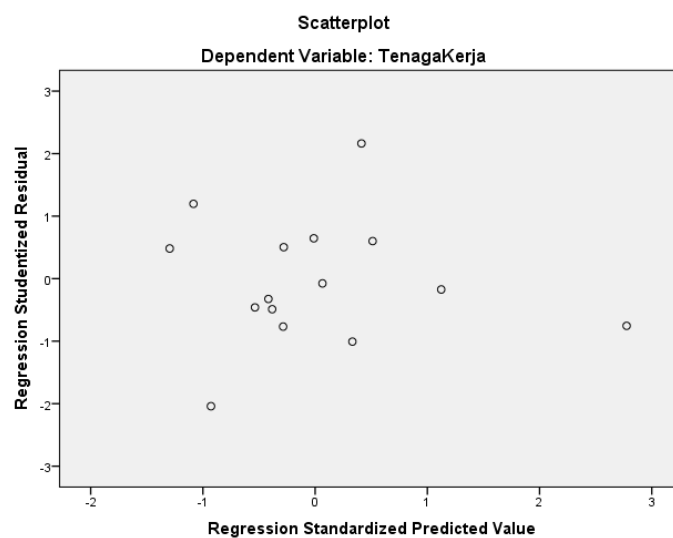
Dilihat dari tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 2,003. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $(n) = 15$, serta $k = 2$ diperoleh nilai dl sebesar 0,946 dan du sebesar 1,543. Dengan ini didapat $4 - du = 2,457$ dan $4 - dl = 3,054$. Jadi dapat disimpulkan $du < dw < 4 - du$ ($1,543 < 2,003 < 2,457$), dengan demikian tidak terjadi Autokorelasi dalam model regresi tersebut.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah SPSS 21

Berdasarkan *output scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik menyebar dan tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Linear Berganda

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	33299.085	6746.177		4.936	.000
1 JUU	139.954	28.042	.912	4.991	.000
UMP	-.007	.004	-.309	-1.691	.117

a. Dependent Variable: TenagaKerja

Sumber : data diolah SPSS 21

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang periode 2001 – 2015. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 33299,085 + 139,954X_1 - 0,007 + e$$

Dimana : $a = \text{konstanta} = 33299,085$

$X_1 = \text{Jumlah Unit Usaha}$ $b_1 = 139,954$

$X_2 = \text{UMP}$ $b_2 = -0,007$

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 33299,085 menunjukkan apabila variabel lain mengalami peningkatan 1% maka variabel penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 33299,085 %.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel 1 yaitu Jumlah unit usaha bertanda positif, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% jumlah unit usaha maka penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 139,954 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Jika semakin bertambah jumlah unit usaha atau perusahaan industri besar dan sedang maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya jika jumlah unit usaha menurun maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel 2 yaitu tingkat upah minimum provinsi bertanda negatif sebesar -0,007, artinya menunjukkan setiap kenaikan upah

minimum provinsi sebesar 1 % maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,007 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara tingkat upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Jika tingkat upah minimum provinsi semakin meningkat maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya jika tingkat upah minimum provinsi menurun maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut yang dimaksud dengan H_a adalah diterimanya hipotesis dan signifikan, sedangkan H_0 ditolaknya hipotesis dan tidak signifikan.

Adapun hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	786377756.521	2	393188878.260	12.618	.001 ^b
	Residual	373918533.212	12	31159877.768		
	Total	1160296289.733	14			

a. Dependent Variable: TenagaKerja

b. Predictors: (Constant), UMP, JUU

Sumber : data diolah SPSS 21

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig. $0,001 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan adanya pengaruh yang signifikan kurang lebih sebesar 95% dari variabel Jumlah Unit Usaha dan Tingkat UMP secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja atau menentukan pengujian dengan cara lain yaitu dengan menentukan terlebih dahulu F_{tabel} berdasarkan signifikansi 0,05, dengan df 1 (jumlah variabel – 1) atau $3-1 = 2$ dan df 2 (n-k-1) atau $15 - 2 - 1 = 12$. Jadi dapat diketahui $df_1 = 2$ dan $df_2 = 12$. Dengan pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk F_{hitung} sebesar 12.618 sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 3,89 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($12,618 > 3,89$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara jumlah unit usaha dan tingkat upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

b. Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada jumlah unit usaha dan tingkat upah minimum provinsi berpengaruh

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial. Dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut yang dimaksud dengan H_a adalah diterimanya hipotesis dan signifikan, sedangkan H_0 ditolaknya hipotesis dan tidak signifikan.

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} dengan signifikan 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $15-2-1 = 12$, dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh t_{tabel} sebesar 2,179.

- 1) Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah unit usaha menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 4,991 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,991 > 2,179$) serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung selama periode 2001 – 2015.
- 2) Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel tingkat upah minimum provinsi menghasilkan t_{hitung} sebesar -1,691 artinya t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,691 < 2,179$) serta nilai

signifikan yang lebih besar dari 0,05 ($0,117 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat UMP kurang lebih 95 % tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung periode 2001 – 2015.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi, yaitu :

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.624	5582.103

a. Predictors: (Constant), UMP, JUU

Sumber : data diolah SPSS 21

Berdasarkan hasil pengamatan dari tabel 4.10, diketahui koefisien determinasi (R^2) adalah 0,678. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat adalah

sebesar 67,8 %. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel jumlah unit usaha dan tingkat upah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 67,8 % sementara sisanya yakni 32,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini seperti investasi, inflasi, PDRB dan faktor lainnya.

D. Pembahasan

3. Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung

Adapun pembahasan dalam skripsi ini dibedakan menjadi 2 yaitu secara parsial dan simultan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaruh Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2001 – 2015

Unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik dan wilayah operasi, dalam artian unit usaha disebut juga sebagai banyaknya perusahaan industri besar dan sedang provinsi Lampung yang diukur dalam satuan unit. Perusahaan tersebut bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda pada variabel jumlah unit usaha bertanda positif sebesar 139,954, artinya menunjukkan kenaikan 1 % jumlah unit usaha atau perusahaan di sektor industri besar dan sedang maka tenaga kerja yang diserap meningkat sebesar 139,954 %. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah unit usaha juga menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,991 > 2,179$) serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung selama periode 2001 – 2015. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriliyantje Ismei, Andri Wijanarko dan Henna Oktaviani, Rio Dhuwi Saputra dan Abdul Karib dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan oleh Tri Wahyu Rejeki Ningsih, menurutnya pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja adalah elastis. Artinya kenaikan jumlah unit usaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap. Bertambahnya unit usaha berarti ada tambahan kesempatan kerja, sehingga akan ada permintaan tenaga kerja baru yang meningkat. Hal ini disebabkan

karena dengan adanya Penambahan unit usaha maka perusahaan akan memerlukan penambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi sehingga menimbulkan permintaan akan tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan adanya penambahan kesempatan kerja tersebut maka akan menambahkan peluang bagi angkatan kerja yang selalu meningkat di tiap tahunnya. Ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut nantinya akan menyerap angkatan kerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Dengan begitu akan mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi masalah.

b. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Upah minimum juga disebut sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

UMP secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan UMP tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 29,17 persen. Kebijakan Peningkatan UMP tersebut tak lepas untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja dan melindungi para pekerja agar para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pengaruh tingkat upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung periode 2001 – 2015. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda pada variabel tingkat upah bertanda negatif sebesar -0,007, artinya menunjukkan setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1 % maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,007 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara tingkat upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Sementara berdasarkan uji 2 sisi signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel tingkat upah menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,691 < 2,179$) serta nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 ($0,117 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat UMP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung periode 2001 – 2015.

Artinya, besar kecilnya upah minimum tidak mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di objek penelitian tahun 2001-2015. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tidak dipengaruhi upah dikarenakan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal, penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal dan kelebihan penawaran tenaga kerja akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya

tidak diatur oleh regulasi, hal ini sesuai dengan model dual ekonomi yang dikembangkan oleh Welch (1974). Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor didalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sektor yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sektor tersebut. Sektor informal yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum dikarenakan sektor informal hanya berskala kecil, yang memiliki modal dan output yang kecil, selain itu kebanyakan pekerja memiliki hubungan keluarga dengan pemilik usaha.

Sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan yang secara yuridis maupun dalam praktek tidak tersentuh atau tidak secara penuh tersentuh oleh pengaturan-pengaturan formal, tingkat organisasi yang rendah, skalanya kecil, usaha rumah tangga, tidak terdaftar dan tidak mengikuti hukum tentang jaminan sosial dan aturan-aturan perundang lainnya. Sementara menurut konferensi internasional perburuhan tenaga kerja mendefinisikan lapangan kerja informal sebagai pekerja yang bertanggung jawab sendiri, pemilik perusahaan yang bekerja dalam usaha informal milik sendiri, tenaga kerja keluarga, anggota dari koperasi produksi sektor informal, dan tenaga kerja yang memiliki pekerjaan informal. Sedangkan sektor formal kegiatannya diatur dalam perundang- undangan, hubungan pekerja dan perusahaan bersifat formal, pada umumnya pekerja tidak memiliki ikatan keluarga, jumlah tenaga kerja yang besar, identik dengan

modern, terdidik (skills dan spesialisasinya), produktivitas tinggi dan menggunakan teknologi tinggi.

Tingkat upah minimum yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja yang kurang produktif dan menggantinya dengan pekerja yang relatif lebih produktif. Akibatnya para pekerja ini akan menjadi menganggur ataupun memasuki sektor informal dimana pekerja terpaksa menerima upah yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor informal, karena dalam sektor informal belum ada pengaturan regulasi UMP. Akibatnya permintaan tenaga kerja disektor formal seperti industri besar dan sedang akan menurun sedangkan kelebihan penawaran tenaga kerja akan diserap disektor informal. Apalagi tenaga kerja tidak terdidik disektor formal akan dikurangi oleh perusahaan karena dianggap tidak produktif atau tidak menguntungkan, dan nantinya akan lebih diserap disektor informal yang kebanyakan tidak memerlukan pendidikan.

Hubungan yang negatif yang terjadi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam permintaan tenaga kerja bahwa pada saat tingkat upah tenaga kerja meningkat akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, demikian pula sebaliknya dengan adanya peningkatan dalam permintaan jumlah tenaga kerja yang diminta disebabkan karena adanya penurunan tingkat upah. sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat upah maka perusahaan itu akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dan akan

memilih untuk menggantikan dengan alat produksi seperti mesin yang tidak memerlukan biaya lebih ataupun tenaga kerja yang lebih produktif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tota Jaunita dalam penelitian tersebut Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

c. Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linear berganda dimana menggunakan uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh hasil untuk F_{hitung} sebesar 12.618 sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 3,89 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($12,618 > 3,89$) maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Untuk nilai sig. nya diperoleh dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.001. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara jumlah unit usaha dan tingkat upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung 2001-2015.

Secara teoritik kenaikan jumlah unit usaha akan memperluas kesempatan kerja, ini dikarenakan perusahaan akan memerlukan penambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Akibatnya, permintaan tenaga kerja bertambah. Begitu pula dengan tingkat upah, kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga

tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Dhuwi Saputra, dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha dan tingkat upah berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung dalam Perspektif Islam

Tenaga kerja menjadi Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya fikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan

mengelola alam tersebut dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya namun tenaga kerjanya memiliki *skill* yang tinggi atau banyak tenaga kerjanya yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Terkait dengan pentingnya fungsi manusia dalam proses produksi, khususnya dalam mengelola alam maka Al-Qur'an menerangkan tentang prinsip dasar tenaga kerja yakni firman Allah SWT, yaitu surat An-Najm ayat 39, sebagai berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa manusia wajib bekerja mengelolah kekayaan alam dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh. Manusia bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan imbal hasil sesuai dengan apa yang telah diusahakannya karena untuk menghasilkan sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras dan kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya. Sedangkan bagi manusia yang tidak mau bekerja atau berusaha maka Allah SWT tidak akan mengubah nasib orang atau kaum tersebut, hal ini terdapat didalam surat An-Anfal ayat 53, yaitu sebagai berikut :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Makna lebih dari ayat tersebut adalah seharusnya manusia sebagai individu atau suatu masyarakat bangsa secara agregat bekerja atau berusaha semaksimal mungkin agar terpenuhi segala kebutuhannya. Apabila manusia atau suatu masyarakat malas atau tidak mau bekerja keras, maka manusia atau masyarakat tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan mengalami kemajuan. Manusia atau masyarakat yang malas bekerja atau berusaha akan tertinggal dan tidak akan mampu hidup selayaknya sesuai kebutuhan zamannya. Pada saat ini, dimana persaingan pada semua aspek kehidupan sangat berat, dibutuhkan semangat dan kemauan berusaha yang tinggi. Manusia atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja kerja keras dan sungguh-sungguh akan mendapat hasilnya dan mampu bertahan bahkan mengalami kemajuan sesuai masanya.

Sebagai seseorang pekerja yang telah menyumbangkan tenaganya bagi kesuksesan tempatnya bekerja selain memiliki kewajiban karyawan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu upah. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada para pekerja atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan

mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah telah melarang memperkerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja sebelum keringatnya kering. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar, Abu Ya'la dan Abu Hurairah yaitu *“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa Khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar Rasulullah dan Khulafur Rasyidin adalah penentuan upah pegawai tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja,

pengusaha/majikan dan Negara. Dalam penentuan keputusan besaran upah, maka kepentingan pencari nafkah/pekerja dan majikan/pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka Negara wajib menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak akan jatuh atau teraniaya dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari. Karena itu tingkat upah disuatu Negara harus memenuhi kebutuhan hidup layak. Di Indonesia sendiri, kebutuhan hidup layak didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM), berdasarkan penelitian UMP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Tingkat UMP dan KHM Provinsi Lampung 2001 -2015 (Rp)

Tahun	UMR	KHM
2001	240.000	260.685
2002	310.000	325.000
2003	350.000	403.000
2004	377.500	377.500
2005	405.000	396.456
2006	505.000	589.540
2007	555.000	554.521
2008	617.000	650.000
2009	619.000	805.308
2010	767.500	861.340
2011	855.000	897.600
2012	975.000	1.008.109

2013	1.150.000	1.060.082
2014	1.399.037	1.399.037
2015	1.581.000	1.442.858

Sumber : BPS, *Lampung Dalam Angka*

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa tingkat upah minimum provinsi lampung selalu dibawah tingkat kebutuhan hidup minimum, hanya pada tahun 2005 dan selanjutnya mengalami perubahan pada tahun 2013 hingga 2015 yang selalu mengalami peningkatan dari kebutuhan hidup minimum (KHM).

Jika pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah maka pekerja juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja, kewajiban seorang pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja. Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja haruslah saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha sedangkan pekerja diuntungkan karena mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan didalam pandangan islam adalah hubungan kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Dalam islam, upah sama halnya dengan ijarah yang didalamnya terdapat *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Transaksi ijarah haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang jelas agar menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian kedua belah

pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapatkan upah secara adil dan bagian sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh. Sementara aniaya terhadap pengusaha adalaah mereka para pengusaha dipaksa oleh kekuatan industri atau kekuatan kelompok pekerja untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.

Islam juga melarang pemberian upah yang tidak berdasarkan sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi, meskipun begitu upah yang diberikan haruslah dapat memenuhi kebutuhannya. Jika pekerja mengerahkan kemampuannya secara maksimal dalam bekerja maka akan menghasilkan output yang positif bagi perusahaan, dengan begitu keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin besar.

Tingkat upah yang diberikan oleh pengusaha/majikan sangat mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi standar penghindupan para pekerja beserta keluarga mereka, sehingga dapat secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Turunnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja tersebut apabila permintaan barang-barang konsumsi dari pekerja turun maka akan berdampak pada sektor industri/produsen itu sendiri pula dan

akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja, akibatnya tenaga kerja yang terpaksa di PHK dalam perusahaan tersebut akan menganggur atau memasuki sektor lain seperti sektor informal, dimana mereka akan terpaksa menerima upah lebih rendah lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung dalam Perspektif Islam tahun 2001-2015 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual (uji t) pada variabel jumlah unit usaha menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 4,991 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,991 > 2,179$) serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_1 diterima H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang provinsi Lampung selama periode 2001 – 2015. Sedangkan pada variabel tingkat upah minimum provinsi menghasilkan t_{hitung} sebesar -1,691 artinya t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,691 < 2,179$) serta nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 ($0,117 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri besar dan sedang provinsi Lampung periode 2001 – 2015. Sementara pada hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($12,618 > 3,89$) dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$ artinya H_3 diterima dan H_0 ditolak.

2. Dalam perspektif Ekonomi Islam tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang terpenting dalam proses produksi. Karena semua kekayaan alam tidak akan berguna apabila tidak ada manusia dan dikelola oleh buruh. Manusia juga berkewajiban untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Sebagai pekerja yang telah menyumbangkan tenaganya ke perusahaan, maka pekerja berhak menerima upah. Berdasarkan prinsip keadilan dalam menentukan upah, Negara wajib menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pokok pekerja, agar pekerja dapat memenuhi kebutuhannya dan juga tidak merugikan bagi pengusaha atau perusahaan. Islam juga melarang tingkat upah dibawah upah minimum yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, di provinsi Lampung upah minimum provinsi (UMP) selalu dibawah standar atau dibawah kebutuhan hidup minimum (KHM). Besaran upah minimum yang selalu dibawah kebutuhan hidup minimum menandakan belum layak nya upah yang diterima pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam dimana dalam menentukan tingkat Upah Minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sebaik-baiknya namun mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki peneliti maka penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat diperhatikan oleh pihak lain diantaranya:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan besar dan sedang yang sudah dikumpulkan atau diterbitkan oleh pihak BPS dalam survey tahunan, karena adanya keterbatasan data maka peneliti memilih penelitian selama lima belas tahun terakhir atau tahun 2001-2015.
2. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah unit usaha atau perusahaan besar-sedang dan tingkat upah minimum provinsi dan jumlah tenaga kerja disektor industri besar dan sedang. Kemungkinan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan variabel lain atau dengan tahun penelitian yang berbeda.

C. Saran

1. Bagi pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan pemerintah agar menetapkan upah minimum diatas kebutuhan hidup layak, Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pemerintah juga harus mempermudah dalam perizinan pendirian usaha sehingga dapat menambah perluasan kesempatan kerja.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan

periode waktu yang digunakan hanya 15 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

3. Bagi Publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat terutama yang memiliki usaha yang cukup besar harus memberikan upah sesuai dengan kebutuhan pekerja dan sesuai dengan sumbangsih pekerja namun tidak merugikan bagi pengusaha. Upah yang diberikan akan mempengaruhi permintaan akan barang, jika permintaan barang-barang konsumsi semakin meningkat maka permintaan tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Peningkatan permintaan tenaga kerja tersebut akan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Jika permintaan barang meningkat menandakan semakin besarnya output yang dikeluarkan perusahaan, output sektor industri yang besar akan menimbulkan *multiplayer effect* pada sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, pertanian, jasa-jasa, dengan begitu penyerapan tenaga kerja akan semakin luas.
4. Bagi pengusaha, dengan penelitian ini diharapkan pengusaha dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsih pekerja dan pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah yang dapat merugikan pengusaha sendiri ataupun tidak sesuai kemampuan mereka namun masih dapat memenuhi kebutuhan si pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, hamzah dan Nanda santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Fajar Mulya, 1996
- Amri, Yassir, Et.Al. *Peran Usaha Industry Mikro Dan Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Diprovinsi Aceh*, (Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Vol 1,No,1 Febuari 2013
- Arsyad, Lincoln dan Stephanus Eri Kusuma, *Ekonomika Indrustika Pendekatan Struktur, Prilaku Dan Kinerja*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi pembangunan edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- Barthos, basir. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara,2012.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan*. Jakarta:Erlangga, 2002.
- Boediono, *Ekonomi Makro* Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2011
- BR, Afrida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia,2003
- Chusna, Arifatul. ‘*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Indrustri,Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Indrustri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2011*’, Skripsi Unnes, 2013.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 1996.
- Dwisaputri, Oktaviana Dan Tri Wahyu Rejeki Ningsih, ‘*Analisis Penyerapn Tenaga Kerja Dikota Salatiga*’, Jurnal ekonomi 25 Maret 2015.

- Falla, Fitria Meiriza. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Indrustri Kecil dan Menengah Diprovinsi Jawa Tengah*, (Skripsi, Universitas Diponogoro Semarang, 2014)
- Feriyanto, Nur. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014.
- Fordebi dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Ed 1 Cet1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Greogry Mankiw, N. *makroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012
- Hasan, Iqbal. *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Hasanah, Ulfa Fuadilah. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Indrustri Menengah Dan Besar Pekalongan 2008-2013*. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Huda, Nurul Et.Al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Jaunita, Tota, *“Analisa Data Panel Pengaruh Umr, Nilai Output, Jumlah Unit Usaha Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indrustri Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah “*. (Naskah Ilmiah, Univesitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016)
- Jaunita, Tota. *Analisis Data Pnel Pengaruh UMR, Nilai Output, Jumlah Unit Usaha Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industry Besar Dan Sedang Di Di Jawa Tengah Thn 2011-2013*, (Naskah Publikasi, Fak. Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Kencana Alumni, 1998
- Lestari, ayu wafi. *Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industry Kecil Dan Menengah Kab. Semarang*, (Skripsi, Fak. Ekonomi UNDIP, 2011)
- Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori Dan Paktek*. Jakarta : Pt Intermasa, 1992.
- Nugroho, Yuniarto Fajar et. al, ‘*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Indrustri Pengolahan Serta Kontribusinya Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2005 – 2011*’, (Jurnal Ilmiah, Universitas Jember, 2015)
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Pius, Abdullah Dan Prasetya Danu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya Arkol, 1998
- Puadah, Samroatul. *Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Putra, Riky Eka. *Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, jurnal ekonomi pembangunan, universitas semarang, November 2012.
- Rejekiningsih, Tri Wahyu. *Mengukur Besarnya Peranan Indrustri Kecil Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Tengah*, Volume 1 No 2, Desember 2004
- Republic Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3
- S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Samuelson Dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi Edisi 17*, Terjemahan Nur Rosyidah et.al, Jakarta : PT. Media Global Edukasi,2003.

Saputra, Rhio dwi. *Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Industri Kecil Kabupaten Malang*, (Jurnal Universitas Brawijaya, 2014)

Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung : PT. Tarsito,2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

-----, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi*. Bandung : Alfabeta,2014

Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013.

-----, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo,2009.

Sulistiawati, Rini. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ekonomi Social Vol.8 No.3, Oktober 2012.

Sumarni, Murti Dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*,. Yogyakarta : 2014.

Swasta, Basu Dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Ekonomi Perusahaan Edisi Ketiga*,. Yogyakarta : Liberty,1995

Teguh, M. *Ekonomi Indrustri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo,2013

Tindaon, Ostinasia. “*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik)*”, Jurnal Maret 2015.

Tjiptoherijanto, Priyono. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (On-Line), Tersedia Di www.hukumonline.com Diakses Pada Tanggal 25 april 2017, 10;21 WIB)

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama* Yogyakarta Pustaka Baru Perss, 2015

-----, *SPSS Untuk Penelitian* , Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015

Wie, Thee kian. *Indrustrialisasi Indonesia Analisis Dan Catatan Kritis*. Jakarta : Pustaka sinar harapan, 1988.

5.